**HASIL EVALUASI RAPERDA KABUPATEN/KOTA …**

**Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**Kode Daerah:**

| **No.** | **Materi Raperda**  **(DIMOHON TIDAK MENGUBAH URUTAN MATERI RAPERDA PADA KOLOM INI)** | **Rumusan Raperda**  **(DIISI OLEH PEMDA) (SALIN MUATAN RAPERDA PADA KOLOM INI)** | **Rekomendasi**  **(DIISI OLEH DJPK)** | **Keterangan**  **(DIISI OLEH DJPK)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAJAK DAERAH** | | | | |
| 1. | Jenis Pajak Daerah |  | Pasal …   1. Jenis Pajak terdiri atas: 2. PBB-P2; 3. BPHTB; 4. PBJT atas:    * 1. makanan dan/atau minuman;      2. tenaga listrik;      3. jasa perhotelan;      4. jasa parkir; dan      5. jasa kesenian dan hiburan; 5. Pajak Reklame; 6. PAT; 7. Pajak MBLB; 8. Pajak Sarang Burung Walet; 9. Opsen PKB; dan 10. Opsen BBNKB. 11. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf …, …, …, dan … tidak dipungut. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 2. | Jenis Pajak Official Assessment |  | Pasal …  Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Wali Kota terdiri atas:   1. PBB-P2; 2. Pajak Reklame; 3. PAT; 4. Opsen PKB; dan 5. Opsen BBNKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 3. | Jenis Pajak Self Assessment |  | Pasal …  Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:   1. BPHTB; 2. PBJT atas;    * 1. makanan dan/atau minuman;      2. tenaga listrik;      3. jasa perhotelan;      4. jasa parkir; dan      5. jasa kesenian dan hiburan; 3. Pajak MBLB; dan 4. Pajak Sarang Burung Walet. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. * . |
| 1. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** | | | | |
| 1. | Subjek Pajak dan Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 2. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 2. | Objek Pajak |  | Pasal …   1. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 2. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. 3. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: 4. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; 5. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 6. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 7. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 8. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 9. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 10. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit),* lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis; 11. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota; dan 12. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2022.   *.* |
| 3. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …   1. Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. 2. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 3. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp… untuk setiap Wajib Pajak. 4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. 5. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten atau Kota. 6. Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  | Pasal …   1. Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. 2. Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi: 3. kenaikan NJOP hasil penilaian; 4. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau 5. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota. 6. Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 13 PP Nomor 35 Tahun 2023..  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 13 PP Nomor 35 Tahun 20233. |
| 4. | Tarif Pajak |  | Pasal …   1. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar …%. 2. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar …%. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 5. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 6. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …   1. Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. 2. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 Ayat (3) dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 Ayat (3) dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 7. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …   1. PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2. 2. Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: 3. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan 4. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 Ayat (5) dan Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 Ayat (5) dan Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** | | | | |
| 1. | Subjek Pajak dan Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 2. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 2. | Objek Pajak |  | Pasal …   1. Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (1) meliputi:    1. pemindahan hak karena: 3. jual beli; 4. tukar-menukar; 5. hibah; 6. hibah wasiat; 7. waris; 8. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 9. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 10. penunjukan pembeli dalam lelang; 11. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 12. penggabungan usaha; 13. peleburan usaha; 14. pemekaran usaha; atau 15. hadiah; dan     1. pemberian hak baru karena:        1. kelanjutan pelepasan hak; atau        2. di luar pelepasan hak. 16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: 17. hak milik; 18. hak guna usaha; 19. hak guna bangunan 20. hak pakai; 21. hak milik atas satuan rumah susun; dan 22. hak pengelolaan. 23. Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: 24. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah; 25. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 26. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 27. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 28. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 29. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 30. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan 31. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32. Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. 33. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 3. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …   1. Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. 2. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:    1. harga transaksi untuk jual beli;    2. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan    3. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. 3. Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. 4. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp … (… rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah. 5. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp… (… rupiah). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 18 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 18 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Tarif Pajak |  | Pasal …  Tarif BPHTB ditetapkan sebesar …% (… persen). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 5. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 6. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …   1. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: 2. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; 3. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; 4. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris; 5. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; 6. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; 7. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau 8. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 9. Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 7. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …  BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 18 Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 18 Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)** | | | | |
| 1. | Subjek Pajak dan Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. 2. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 2. | Objek Pajak |  | Pasal …  Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:   1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 3. | Rincian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)incian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | | | |
|  | PBJT atas Makanan dan/atau Minuman |  | Pasal …   1. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal … huruf … meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: 2. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; 3. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:    * 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. 4. Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: 5. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp... (… rupiah) per ... (satuan waktu tertentu); 6. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; 7. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau 8. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  | PBJT atas Tenaga Listrik |  | Pasal …   1. Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. huruf …. adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. 2. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 3. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya; 4. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik; 5. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 6. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan 7. …. (konsumsi Tenaga Listrik lainnya jika ada, diskresi Pemda). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  | PBJT atas Jasa Perhotelan |  | Pasal …   1. Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … huruf … meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: 2. hotel; 3. hostel; 4. vila; 5. pondok wisata; 6. motel; 7. losmen; 8. wisma pariwisata; 9. pesanggrahan; 10. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*; 11. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan 12. glamping. 13. Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 14. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; 15. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 16. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 17. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 18. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  | PBJT atas Jasa Parkir |  | Pasal …   1. Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal … huruf … meliputi: 2. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau 3. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*). 4. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 5. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; 6. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; 7. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan 8. …. (jasa tempat parkir lainnya jika ada, diskresi Pemda.) | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  | PBJT atas Jasa Kesenian Dan Hiburan |  | Pasal …   1. Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … huruf … meliputi: 2. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 3. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 4. kontes kecantikan; 5. kontes binaraga; 6. pameran; 7. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 8. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 9. permainan ketangkasan; 10. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 11. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; 12. panti pijat dan pijat refleksi; dan 13. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 14. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: 15. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; 16. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau 17. … (bentuk kesenian dan hiburan lainnya jika ada, diskresi Pemda). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 4. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …   1. Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: 2. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; 3. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; 4. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; 5. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan 6. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan. 7. Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. 8. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah. 9. Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  | Pasal …   1. Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat (…) huruf … ditetapkan untuk: 2. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan 3. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 4. Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan: 5. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan 6. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. 7. Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: 8. kapasitas tersedia; 9. tingkat penggunaan listrik; 10. jangka waktu pemakaian listrik; dan 11. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. 12. Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat (…), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 5. | Tarif Pajak |  | Pasal …   1. Tarif PBJT ditetapkan sebesar ...% (... persen) 2. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar …% (… persen). 3. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: 4. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar …% (…persen); dan 5. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar …% (…persen). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 6. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 7. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …  Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:   1. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; 2. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; 3. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; 4. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan 5. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 8. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …  PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **Pajak Reklame** | | | | |
| 1. | Subjek Pajak dan Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. 2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 61 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 2. | Objek Pajak |  | Pasal …   1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. 2. Objek Pajak Reklame meliputi: 3. Reklame papan*/billboard*/*videotron*/*megatron*; 4. Reklame kain; 5. Reklame melekat/stiker; 6. Reklame selebaran; 7. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 8. Reklame udara; 9. Reklame apung; 10. Reklame film/*slide*; dan 11. Reklame peragaan. 12. Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 13. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 14. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 15. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 16. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; 17. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan 18. ... (Reklame lainnya jika ada, diskresi Pemda). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 3. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …   1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame. 2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. 3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 4. Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 14 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 14 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 4. | Tarif Pajak |  | Pasal …  Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar ...% (…persen). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 5. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 6. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …  Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 7. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …   1. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. 2. Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **Pajak Air Tanah (PAT)** | | | | |
| 1. | Subjek Pajak dan Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 2. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 2. | Objek Pajak |  | Pasal …   1. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 2. Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: 3. keperluan dasar rumah tangga; 4. pengairan pertanian rakyat; 5. perikanan rakyat; 6. peternakan rakyat; 7. keperluan keagamaan; dan 8. … (kegiatan lainnya jika ada, diskresi Pemda). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 3. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …   1. Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah. 2. Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. 3. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. 4. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: 5. jenis sumber air; 6. lokasi sumber air; 7. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 8. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 9. kualitas air; dan 10. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 11. Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 4. | Tarif Pajak |  | Pasal …  Tarif PAT ditetapkan sebesar …% (...persen). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 5. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 6. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …  Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 7. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …  PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)** | | | | |
| 1. | Subjek Pajak dan Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. 2. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 2. | Objek Pajak |  | Pasal …   1. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: 2. asbes; 3. batu tulis; 4. batu setengah permata; 5. batu kapur; 6. batu apung; 7. batu permata; 8. bentonit; 9. dolomit; 10. *feldspar*; 11. garam batu (*halite*); 12. grafit; 13. granit/andesit; 14. gips; 15. kalsit; 16. kaolin; 17. leusit; 18. magnesit; 19. mika; 20. marmer; 21. nitrat; 22. obsidian; 23. oker; 24. pasir dan kerikil; 25. pasir kuarsa; 26. perlit; 27. fosfat; 28. talk; 29. tanah serap (*fullers earth*); 30. tanah diatom; 31. tanah liat; 32. tawas (*alum*); 33. tras; 34. yarosit; 35. zeolit; 36. basal; 37. trakhit; 38. belerang; 39. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan 40. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 41. Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB: 42. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; 43. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan 44. ... (untuk keperluan lainnya jika ada, diskresi Pemda). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. |
| 3. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …   1. Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB. 2. Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. 3. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah. 4. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 4. | Tarif Pajak |  | Pasal …  Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar …% (…). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 5. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 6. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …  Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 7. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …  Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 21 Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 21 Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **Pajak Sarang Burung Walet** | | | | |
| 1. | Subjek Pajak dan Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. 2. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 2. | Objek Pajak |  | Pasal …   1. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. 2. Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah: 3. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan 4. … (kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya jika ada, diskresi Pemda). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 3. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …   1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet. 2. Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 4. | Tarif Pajak |  | Pasal …  Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar …% (… persen). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 5. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 80 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 6. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …  Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 7. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …  Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **OPSEN PKB** | | | | |
| 1. | Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB. 2. Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 82 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  |  |  | Pasal …  Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 81 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 2. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …  Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 3. | Tarif Pajak |  | Pasal …  Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 83 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 4. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 107 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 5. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …  Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 16 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 16 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 6. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …  Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan 1.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)** | | | | |
| 1. | Wajib Pajak |  | Pasal …   1. Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. 2. Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 82 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  |  |  | Pasal …  Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 81 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 2. | Dasar Pengenaan Pajak |  | Pasal …  Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 3. | Tarif Pajak |  | Pasal …  Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 83 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
| 4. | Cara Perhitungan Pajak |  | Pasal …  Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 107 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 5. | Saat Terutang Pajak |  | Pasal …  Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 17 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 17 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 6. | Wilayah Pemungutan Pajak |  | Pasal …  Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| **RETRIBUSI DAERAH** | | | | |
| 1. | Jenis Retribusi |  | Pasal …  Jenis Retribusi terdiri atas:   1. Retribusi Jasa Umum; 2. Retribusi Jasa Usaha; dan 3. Retribusi Perizinan Tertentu. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 26 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 26 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 1. **Retribusi Jasa Umum** | | | | |
| 1. | Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi |  | Pasal …   1. Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum. 2. Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 27 Ayat (7) dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 27 Ayat (7) dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 2. | Objek Retribusi |  | Pasal …   1. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:    1. pelayanan kesehatan;    2. pelayanan kebersihan;    3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;    4. pelayanan pasar; dan    5. pengendalian lalu lintas. 2. Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 4. Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:    1. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;    2. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan    3. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 6. Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati atau Wali Kota ditetapkan. 7. Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 27 Ayat (1) s.d. Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 27 Ayat (1) s.d. Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 3. | Rincian Pelayanan |  | | |
|  | Pelayanan Kesehatan |  | Pasal …  Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 28 PP Nomor 35 Tahun 2023. * Mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi rumusan Perda, jenis tindakan atas pelayanan tidak perlu dicantumkan dalam Raperda PDRD. |
|  | Pelayanan Kebersihan |  | Pasal …   1. Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:    1. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;    2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;    3. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.    4. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan    5. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. 2. Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum |  | Pasal …  Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Pelayanan Pasar |  | Pasal …  Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Pengendalian Lalu Lintas |  | Pasal …   1. Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan …, koridor …, atau kawasan … pada waktu … oleh pengguna kendaraan bermotor. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 4. | Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi |  | Pasal …   1. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. 2. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan: 3. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan; 4. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; 5. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; 6. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan 7. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor. 8. **Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. (Ayat ini bersifat opsional)** | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 5. | Tarif Retribusi |  | Pasal …   1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  | Pasal …  Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dengan tarif Retribusi. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  | Pasal …   1. Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 3. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. 4. Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  | Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN)  Diharapkan Pemda dapat memasukkan tarif layanan dalam beberapa baris berdasarkan jenis layanan |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pengendalian Lalu Lintas | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
| **B. Retribusi Jasa Usaha** | | | | |
| 1. | Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi |  | Pasal …   1. Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha. 2. Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 34 Ayat (7) dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 34 Ayat (7) dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 2. | Objek Retribusi |  | Pasal …   1. Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:    1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;    2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;    3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;    4. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;    5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;    6. pelayanan jasa kepelabuhanan;    7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;    8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;    9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan    10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 4. Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: 6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 7. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 8. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 9. Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati atau Wali Kota ditetapkan. 10. Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 34 Ayat (1) s.d. Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 34 Ayat (1) s.d. Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 3. | Rincian Pelayanan | | | |
|  | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha |  | Pasal …  Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Penyediaan Tempat Pelelangan |  | Pasal …   1. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 2. Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan |  | Pasal …  Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila |  | Pasal …  Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak |  | Pasal …  Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 39 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Pelayanan jasa kepelabuhanan |  | Pasal …  Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga |  | Pasal …  Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 41 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air |  | Pasal …  Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 42 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah |  | Pasal …  Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Pemanfaatan aset Daerah |  |  |  |
| 4. | Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi |  | Pasal …   1. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. 2. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: 3. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; 4. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan; 5. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; 6. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; 7. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan; 8. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan; 9. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; 10. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air; 11. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan 12. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 5. | Tarif Retribusi |  | Pasal …   1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  | Pasal …  Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dengan tarif Retribusi. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  | Pasal …   1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini. 2. Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:    1. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;    2. kerja sama pemanfaatan;    3. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau    4. kerja sama penyediaan infrastruktur,   tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran … yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.   1. Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. 2. Penetapan Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah. 3. Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:    1. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;    2. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan    3. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 4. Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah. 5. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 6. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. 7. Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (9), (10), (11), dan Ayat (12) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (9), (10), (11), dan Ayat (12) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan tempat kegiatan usaha | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan tempat pelelangan | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan jasa kepelabuhanan | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan aset Daerah | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), (5), dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), (5), dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **C. Retribusi Perizinan Tertentu** | | | | |
| 1. | Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi |  | Pasal …   1. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu. 2. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 2. | Objek Retribusi |  | Pasal …   1. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal … meliputi:    1. persetujuan bangunan gedung; dan    2. penggunaan tenaga kerja asing. 2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 3. | Rincian Pelayanan | | | |
|  | Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung |  | Pasal …   1. Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal … meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. 3. Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:    1. Pembangunan baru;    2. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;    3. PBG perubahan untuk:       1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;       2. perubahan lapis Bangunan Gedung;       3. perubahan luas Bangunan Gedung;       4. perubahan tampak Bangunan Gedung;       5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;       6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;       7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau       8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.    4. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. 4. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 PP Nomor 35 Tahun 2023 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 46 PP Nomor 35 Tahun 2023 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. |
|  | Pelayanan Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing |  | Pasal …   1. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 2. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 PP Nomor 35 Tahun 2023 dan PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 PP Nomor 35 Tahun 2023 dan PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. |
| 4. | Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi |  | Pasal …   1. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. 2. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: 3. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan 4. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan. 5. Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 6. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 7. Luas Total Lantai; 8. Indeks Lokalitas; 9. Indeks Terintegrasi; 10. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan 11. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: 12. Volume; 13. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 14. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. |
| 5. | Tarif Retribusi |  | Pasal …   1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup***sebagian atau seluruh*** biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 3. Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... , biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung. 4. Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 PP Nomor 35 Tahun 2023.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 49 PP Nomor 35 Tahun 2023. * Pemda memilih salah satu, antara “**sebagian**” atau “**seluruh**” dalam prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu. |
|  |  |  | Pasal …   1. Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dengan tarif Retribusi. 2. Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG. 3. Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 4. SHST untuk Bangunan Gedung; atau 5. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023, dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023, dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. |
|  |  |  | Pasal …   1. Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. 2. Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. 3. Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 5. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu. 6. Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas. 7. Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 8. Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU Nomor 1 Tahun 2022.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  | Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Persetujuan Bangunan Gedung | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  **Jika belum sesuai:**   * Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing | (DIISI DENGAN RUMUSAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF YANG TERTERA PADA LAMPIRAN) |  | **Jika telah sesuai:**  Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023, serta PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.  **Jika belum sesuai:**  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023, serta PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |